

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 1 TAHUN 2023
Nomor : 129/SK/BP/ICW/V/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

SARAH SADIQA
Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

dan

AGUS SUNARYANTO
KOORDINATOR BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH

Sepakat mengadakan kerja sama secara sinergis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi:

1. Pengembangan kajian-kajian bersama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sosialisasi kegiatan dan kampanye bersama melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, dan/atau lokakarya;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk masyarakat sipil, Aparatur Sipil Negara, dan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
4. Peningkatan partisipasi publik dalam memantau dan melaporkan penyimpangan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Penguatan partisipasi dan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
8. Pengembangan bersama sistem-sistem elektronik untuk pengelolaan dan pemantauan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Implementasi Standar Layanan Informasi Publik dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

10. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11 - 05 - 2023).

**LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
a.n. KEPALA,
Plt. SEKRETARIS UTAMA,**



SARAH SADIQA

**INDONESIA CORRUPTION WATCH
KOORDINATOR BADAN PEKERJA,**

AGUS SUNARYANTO



OPEN GOVERNMENT WEEK 2023

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN DISKUSI PANEL

Bogat Widyatmoko, SE, MA

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas

Siti Juliantari Rachman

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch



Ir. Sonny Sumarsono, MBA., PMP

Ketua DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia

Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

KEYNOTE SPEAKERS

Sarah Sadiqa, SH., M.Sc.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan, LKPP

Rita Berlis

Ketua DPP Bidang Pengembangan Profesi, IAPI

Wana Alamsyah

Manager Divisi Knowledge Management, ICW



NARASUMBER

MODERATOR



Dewi Anggraeni

"PENINGKATAN EFISIENSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM TRANSFORMASI PENGADAAN PUBLIK"

KAMIS, 11 MEI 2023

12.45 WIB - 15.45 WIB

LANTAI 2 BALLROOM B, GRAND HYATT HOTEL, JAKARTA



OGI Week 2023

1. Bertempat di Grand Hyatt 10-11 Mei 2023 Ballroom B (13x18x7m)
 2. Roundtable untuk peserta masing-masing 8 kursi
 3. Sofa di panggung 4, operator zoom 1, regis 1, booth di luar ruangan, podium untuk sambutan, meja penandatanganan MOU
 4. Agenda start 12.45 diawali makan siang
 5. Ruang makan terbatas, hanya 100 tempat duduk atas nama Bappenas, flow peserta perlu diatur
 6. Ruang jam 12.00 -13.00 (kemungkinan) belum bisa dipakai karna ganti layout, dll dll
 7. Protokol sambutan LKPP pejabat tertinggi itu terahir, karna cukup banyak yg memberi sambutan, mungkin bisa di pecah ada yg sambutan sbkm (Bappenas dan ICW) dan sesudah (IAPI dan LKPP) penandatanganan MOU
 8. Jurnalis perlu di infokan lokasi untuk doorstep/konpers pada saat pengisian daftar hadir
 9. Untuk sementara hanya menggunakan zoom webinar untuk streaming?
 10. Interpreter akan di siapkan ICW
 11. Loading barang untuk booth bisa dari pagi
 12. Apakah perlu bahan publikasi untuk peserta?
- 3:00 PM





TOR

https://docs.google.com/document/d/1TsvqEvp1CrMTIDMK_wunA8FeyYzrQDm8WlguTw1zuqg/edit

Siaran Pers

<https://docs.google.com/document/d/1M4ytW5-FUTPBKYxWMITrR2zDduBNI9EKijAK67DMDC8/edit>

Layout Ballroom

